

## 66 GAMPONG DI LHOKSEUMAWE BELUM CAIRKAN DANA DESA TAHAP TIGA



*For Serambinews.com*

*Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, Drs Nasruddin MM.  
Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe*

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, sampai dengan Minggu (4/9/2022), masih ada 66 gampong yang belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap tiga. Untuk diketahui, pada tahun 2022 ini, jumlah DD secara keseluruhan bagi 68 gampong di Kota Lhokseumawe berkurang dari jumlah DD tahun 2021. Dimana pada tahun 2021, jumlah DD bagi keseluruhan gampong di Kota Lhokseumawe mencapai Rp 61,9 miliar. Sedangkan tahun 2022 ini hanya Rp 53,9 miliar. Artinya, berkurang sekitar Rp 8 miliar. Disamping itu, Pagu DD untuk setiap gampong di Kota Lhokseumawe berbeda. Sedangkan untuk penentuan sejumlah Pagu didasari sejumlah katagori diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografis, serta kinerja. Lalu, pada tahun 2022 ini, ada 11 desa yang mendapatkan tambahan DD dari hasil kinerja. Karena 11 desa tersebut mampu mengelola DD tahun 2021 lalu sesuai dengan juknis dan tepat waktu. Sebelas gampong yang mendapatkan DD tambahan dari katagori kinerja adalah Cut Mamplam, Meunasah Mee, Meunasah Mesjid, Paya Punteuet, Kampung Jawa Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Pusong Lhokseumawe, Tunong, Batuphat Barat, Paloh Punti, dan Padang Sakti. jadi, bila dikalkulasi secara menyeluruh dari katagori- katagori di atas, maka gampong yang paling banyak DD di Kota Lhokseumawe tahun 2022 adalah Meunasah Masjid, yakni sebanyak Rp. 1.117.973.000,- dan terendah Gampong Blang Weu Panjo, sebanyak Rp 642.794.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, Drs Nasruddin MM, kembali menjelaskan, pada tahun ini, Lhokseumawe termasuk daerah yang tercepat menyalurkan DD di Provinsi Aceh. Bahkan sempat mendapatkan sertifikat dari Gubernur Aceh diawal tahun 2022 karena tercepat mulai penyaluran DD. Untuk

perkembangan penyaluran DD di Kota Lhokseumawe, sampai saat ini, seluruh gampong sudah tuntas mencairkan DD tahap I dan Tahap II. Sehingga kini sudah mulai memasuki penyaluran DD tahap III atau tahap terakhir pada tahun 2022 ini. Sejauh ini, baru ada dua gampong yang telah mencairkan DD tahap III, yakni Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua dan Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti. "Jadi masih ada 66 gampong yang belum mencairkan DD tahap III," katanya. Namun bagi 66 gampong tersebut saat ini sedang mempersiapkan administrasi saja guna pencairan DD tahap III. "Intinya, kita tetap optimis, dalam satu bulan kedepan, seluruh gampong di Lhokseumawe sudah tuntas mencairkan DD tahap III," pungkas Nasruddin. (\*)

**Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2022/09/04/66-gampong-di-lhokseumawe-belum-cairkan-dana-desa-tahap-tiga?page=2>, Minggu, 4 September 2022.

**Catatan:**

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - a. Pasal 71
    - 1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
    - 2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
  - b. Pasal 72
    - 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
      - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
      - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
      - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
      - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
      - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
      - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
      - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

- 4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - 6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa:
- a. Pasal 1 angka 33  
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  - b. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
    - a) penganggaran;
    - b) pengalokasian;
    - c) penyaluran;
    - d) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
    - e) penggunaan;
    - f) pemantauan dan evaluasi; dan
    - g) sanksi
  - c. Pasal 19
    - 1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
      - a) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
        1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
        2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
        3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;

4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
- b) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
  3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
  5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
  6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- 2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
  - 3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penenma manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
  - 4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan

bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 5) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- 6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

d. Pasal 22

- 1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
  - a) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
    1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
    2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
    3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati/wali kota; dan
  - b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
    1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
    3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah

menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

- 2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- 3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- 4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- 5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).